



## **RENCANA KERJA**

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2021**



**JL. M.H THAMRIN NO.11 TELP/FAX (0536) 3224547, PALANGKA RAYA  
KALIMANTAN TENGAH  
73112**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan acuan kerja dalam melaksanakan kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021 ini mengacu pada rencana pelaksanaan program kegiatan yang tetuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016–2021 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan memperhatikan kewenangan institusi serta perkembangan yang ada dilingkungan internal dan eksternal, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (RENJA) DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut guna mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas semoga kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 07 Agustus 2020

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630527 199102 1 001

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian Renstra PD.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD .....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	43
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat .....	63
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	66
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	78
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	82
4.1 Program dan Kegiatan .....	82
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	99

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun RENJA PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. RENJA PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan PD DP3APPKB untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

RENJA PD DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. RENJA PD DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun menjabarkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan serta arah pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA).

RENJA PD DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Dokumen RENJA PD DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun berfungsi menterjemahkan, mengoperasikan RKPD ke dalam program dan kegiatan PD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara

keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA PD mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja PD DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

RENJA PD DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan rencana strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2021.
2. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021.
3. Mengukur kinerja pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA PD DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 adalah :

1. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
2. Mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;
4. Menyediakan dokumen untuk perwujudan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen RENJA PD DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran RENJA PD

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, serta tabel rencana program dan kegiatan

## **BAB V PENUTUP**

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD

Dokumen RENJA PD Tahun 2021 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi PD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi perangkat daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian pada tahun berjalan pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk evaluasi program dan kegiatan tahun 2021. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun 2019 dijabarkan pada **tabel 2.1**

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

**PD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)		1,200.0	400	200	200	16.67	200	200	100.00
2.02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		600.0	200	100	100	16.67	100	100	100.00
2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	600.0	200	100	100	16.67	100	100	100.00
2.02.2.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan	72.0	24	12	12	16.67	12	12	100.00
2.02.2.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan	72.0	24	12	12	16.67	12	12	100.00
2.02.2.02.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah unit	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan	72.0	24	12	12	16.67	12	12	100.00
2.02.2.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan	72.0	24	12	12	16.67	12	12	100.00
2.02.2.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan	72.0	24	12	12	16.67	12	12	100.00
2.02.2.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan	72.0	24	12	12	16.67	12	12	100.00
2.02.2.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan	72.0	24	12	12	16.67	12	12	100.00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan	72.0	24	12	12	16.67	12	12	100.00
2.02.2.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan	72.0	24	12	12	16.67	12	12	100.00
2.02.2.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket	5.0	1	1	1	20.00	1	1	100.00
2.02.2.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan	12.0	24	12	12	100.00	12	12	100.00
2.02.2.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan	72.0	24	12	12	16.67	12	12	100.00
2.02.2.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan	72.0	24	12	12	16.67	12	12	100.00
2.02.2.02.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah bulan	72.0	24	12	12	16.67	12	12	100.00
2.02.2.02.01.01.35	Rujukan Berobat PNS	Jumlah Aparatur	10.0	1	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)	600.0	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>16.67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
2.02.2.02.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah paket	2.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit	6.0	2	1	1	16.67	1	1	100.00
2.02.2.02.01.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala halaman dan tempat parkir	Jumlah unit	4.0	0	1	1	25.00	1	1	100.00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.02.2.02.01.02.80	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi	Jumlah aplikasi	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian ketersediaan Seragam dan pakaian khusus bagi aparatur (%)	600.0	0	100	100	16.67	100	100	100.00
2.02.2.02.01.03.01	Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah pakaian	300.0	0			0.00			0.00
2.02.2.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian	300.0	0	78	78	26.00	78	78	100.00
2.02.2.02.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian	75.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.03.09	Pengadaan pakaian batik tradisional	Jumlah pakaian	225.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian peningkatan kapasitas pegawai (%)	600.0	100	100	100	16.67	100	100	100.00
2.02.2.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah bulan	48.0	0	12	12	25.00	12	12	100.00
2.02.2.02.01.05.36	Rapat koordinasi perencanaan	Jumlah rapat	54.0	6	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja dan keuangan (%)	600.0	200	100	100	16.67	100	100	100.00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.02.2.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	6.0	2	1	1	16.67	1	1	100.00
2.02.2.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen	6.0	2	1	1	16.67	1	1	100.00
2.02.2.02.01.06.06	Penyusunan rka-SKPD	Jumlah dokumen	12.0	4	2	2	16.67	2	2	100.00
2.02.2.02.01.06.15	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen	12.0	4	2	2	16.67	2	2	100.00
2.02.2.02.01.06.78	Penyusunan dokumen ARG DP3A-PPKB	Jumlah dokumen	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.08	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Capaian pengelolaan aset dan barang milik daerah (%)	600.0	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>16.67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
2.02.2.02.01.08.01	Pengelolaan inventaris barang daerah	Jumlah dokumen	6.0	2	1	0.75	0.00	1	0.75	0.00
2.02.2.02.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)	600.0	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>16.67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
2.02.2.02.01.15.05	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Dokumen	6.0	2	1	1	16.67	1	1	100.00
2.02.2.02.01.15.08	Sosialisasi RAD PUG Kab./Kota	Jumlah Dokumen	1.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.09	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab./Kota	Jumlah Dokumen	6.0	3	1	1	16.67	1	1	100.00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.02.2.02.01.15.10	Rakor Pokja PUG dan tim teknis ARG tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.11	Rakor Pokja PUG Kab./Kota seKalteng	Jumlah Dokumen	1.0	1	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.12	Rapat Koordinasi Forum PKHP	Jumlah Dokumen	1.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.14	Sosialisasi Pembentukan Pokjatab danSatgas PkdRT se-Kalteng	Jumlah peserta	30.0	30	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.15	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	Jumlah Dokumen	1.0	1	1	1	100.00	1	1	100.00
2.02.2.02.01.15.17	Rapat-Rapat Koordinasi Pemantapan Lembaga	Jumlah Dokumen	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.20	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA TingkatProvinsi	Jumlah Dokumen	5.0	1	1	1	20.00	1	1	100.00
2.02.2.02.01.15.21	Sosialisasi/Advokasi pengembangan PHA diKab./Kota se Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	2.0	2	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.24	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	Jumlah Dokumen	6.0	2	1	1	16.67	1	1	100.00
2.02.2.02.01.15.25	Rakornas Forum Anak Nasional	Jumlah Dokumen	6.0	2	1	1	16.67	1	1	100.00
2.02.2.02.01.15.26	Rakorda Forum Anak Daerah	Jumlah Dokumen	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.27	Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen	2.0	0	1	1	50.00	1	1	100.00
2.02.2.02.01.15.29	Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanGerakan Sayang Ibu	Jumlah Dokumen	6.0	2	1	1.00	16.67	1	1.00	100.00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.02.2.02.01.15.30	Rapat Koordinasi Pokjatatap Gerakan Sayanglbu (GSI) Provinsi,Kabupaten dan Kota	Jumlah Dokumen	5.0	1	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.31	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	Jumlah Dokumen	5.0	1	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.32	Perumusan dan penyusunan kebijakan Daerah Tentang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah peserta	200.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.33	Sosialisasi Kebijakan PUG	Jumlah peserta	200.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.34	Sosialisasi Kebijakan ARG	Jumlah peserta	200.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.35	Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta	200.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.36	Pembelajaran Keluar Daerah Tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen	6.0	2	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.37	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.38	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.15.39	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang PHA	Jumlah Dokumen	4.0	0	1	1	25.00	1	1	100.00
2.02.2.02.01.15.40	Monev PUG di Daerah	Jumlah Dokumen	4.0	0	1	1.00	25.00	1	1.00	100.00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.02.2.02.01.15.41	Monev Perlindungan Perempuan dan Anak Didaerah	Jumlah Dokumen	4.0	0	1	1.00	25.00	1	1.00	100.00
2.02.2.02.01.15.42	Monev Pemenuhan Hak Anak (PHA) Didaerah	Jumlah Dokumen	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan pengembangan layanan lembaga PUG, PP PA (%)	600.0	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>16.67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
2.02.2.02.01.16.33	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Jumlah Dokumen	217.0	34	1	1	0.46	1	1	100.00
2.02.2.02.01.16.34	Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD	Jumlah OPD	24.0	12	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.16.35	Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD dan Aplikasi ARG di SKPD	Jumlah Dokumen	2.0	2	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.16.36	TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)	Jumlah peserta	66.0	10	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.16.42	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	Jumlah Dokumen	1.0	1	1	1	100.00	1	1	100.00
2.02.2.02.01.16.51	Pelatihan ARG Bagi Focal Point SKPD Provinsi	Jumlah peserta	92.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.16.52	Pelatihan Bagi Tim Teknis ARG	Jumlah peserta	132.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak (%)	Cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak (%)	600.0	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>16.67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.02.2.02.01.17.26	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	Jumlah Kegiatan	30.0	10	5	1.00	16.67	5	1.00	500.00
2.02.2.02.01.17.27	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	Jumlah dokumen	2.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.17.28	Pemilihan Putra dan Putri Duta Gender Provinsi Kalteng	Jumlah kegiatan	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.17.30	Penyusunan Buku Panduan Pencegahan KdRT	Jumlah exemplar	50.0	50	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.17.31	Sosialisasi Anti Kekerasan	Jumlah kegiatan	6.0	2	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.17.32	Peningkatan Sistem Pelayanan Rujukan Lanjutan	Jumlah unit	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.17.33	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Jumlah Dokumen	6.0	2	1	1.00	16.67	1	1.00	100.00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.02.2.02.01.17.35	Pelatihan/Magang Tenaga Pendamping P2TP2A se-Kab./Kota	Jumlah peserta	175.0	35	35	35	20.00	35	35	100.00
2.02.2.02.01.17.36	Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan,dll)	Jumlah anggota satgas	480.0	160	30	30	6.25	30	30	100.00
2.02.2.02.01.17.37	Pelatihan Kader Satgas PKdRT Prov/Kab/Kota Untuk Penanganan Tahap Awal	Jumlah Kader	600.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.17.38	Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Hari Nasional Perempuan	Jumlah Dokumen	1.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.17.39	Deteksi Dini Kanker Cervix Bagi Perempuan	Jumlah peserta	200.0	200	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.17.40	Layanan Kesehatan Khusus Perempuan	Jumlah peserta	600.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.17.41	Sosialisasi advokasi layanan P2TP2A	Jumlah kegiatan	8.0	0	2	2	25.00	2	2	100.00
2.02.2.02.01.17.42	Promosi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kegiatan	16.0	0	4	4	25.00	4	4	100.00
2.02.2.02.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan peran serta perempuan di berbagai bidang (%)	600.0	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>16.67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
2.02.2.02.01.18.07	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	Jumlah kegiatan	6.0	2	1	1	16.67	1	1	100.00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.02.2.02.01.18.08	Pembentukan Kaukus Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah kaukus	2.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.18.11	Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga Untuk Menuju Keluarga Yang Berkualitas	Jumlah peserta	400.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.18.12	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Menuju Lingkungan Sehat Bagi Rumah Tangga	Jumlah peserta	100.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.18.13	Pengembangan Forum Pemberdayaan Produktifitas Ekonomi Perempuan (F-PPEP)	Jumlah Dokumen	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.18.14	Sosialisasi Tentang Akses Permodalan Untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Jumlah peserta	200.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.18.15	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Jumlah dokumen monev	5.0	1	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.18.16	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Jumlah peserta	250.0	50	0	0	0.00	0	0	0.00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.02.2.02.01.18.17	Penilaian Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Dokumen	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.18.18	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS, (Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional )	Jumlah Dokumen	3.0	3	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.18.19	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan Dalam Menunjang PM2L	Jumlah Desa PM2L	60.0	14	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.18.25	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Jumlah promosi	8.0	1	1	1	12.50	1	1	100.00
2.02.2.02.01.18.26	Capacity Building Bagi perempuan	Jumlah Peserta	240.0	0	60	60	25.00	60	60	100.00
2.02.2.02.01.18.27	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	Jumlah peserta	120.0	0	30	30	25.00	30	30	100.00
2.02.2.02.01.20	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak (%)	600.0	0	100	100	16.67	100	100	100.00
2.02.2.02.01.20.07	Kegiatan Sunatan massal	Jumlah Anak	240.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.18.17	Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan Hukum	Jumlah peserta	60.0	0	60	60	100.00	60	60	100.00
2.02.2.02.01.18.18	Pelatihan Penyuluhan Sebaya Tentang Pergaulan Bebas	Jumlah peserta	400.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.18.20	Pembentukan Pokja Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Jumlah Dokumen	1.0	0	1	1	100.00	1	1	100.00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.02.2.02.01.18.21	Pelatihan Alat Analisis Perencanaan Pembangunan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Bagi Anggota Gugus Tugas PHA Provinsi	Jumlah peserta	60.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.21	Program Penyusunan Profil Lembaga	Capaian ketersediaan data profil PUG PP PA (%)	600.0	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>16.67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>
2.02.2.02.01.21.07	Surveilen Data Terpilah Gender dan Anak Bagi Anggota Forum Data di Provinsi	Jumlah Dokumen	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.21.09	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah aplikasi	2.0	0	1	1	50.00	1	1	100.00
2.02.2.02.01.21.10	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen	5.0	1	1	1	20.00	1	1	100.00
2.02.2.02.01.21.11	Penyusunan Buku Panduan Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen	2.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.21.12	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Dokumen	72.0	24	12	12	16.67	12	12	100.00
2.02.2.02.01.21.13	Sosialisasi Hasil Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah peserta	104.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.21.17	Survailens Data Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.02.2.02.01.21.18	Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen	8.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08	Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		600.0	200	100	100	16.67	100	100	100.00
2.08.2.02.01 - 15	Program Keluarga Berencana	Cakupan layanan kependudukan dan Pembinaan Keluarga (%)	600.0	200	100	100	16.67	100	100	100.00
2.08.2.02.01.15.02	Pelayanan KIE	Jumlah Dokumen	6.0	2	1	1	16.67	1	1	100.00
2.08.2.02.01.15.22	Promosi Keikutsertaan BerKB Pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Peserta	500.0	100	0	0	0.00	0	0	0.00
2.08.2.02.01.15.24	Promosi Kepedulian KB	Jumlah promosi	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.08.2.02.01.15.25	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	Jumlah promosi	4.0	0	1	1	25.00	1	1	100.00
2.08.2.02.01.15.26	Bimbingan Teknis Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah Peserta	240.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.08.2.02.01.15.27	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.08.2.02.01.15.28	Sosialisasi/Advokasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Tingkat Kab./Kota	Jumlah Dokumen	4.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08.2.02.01.15.29	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen	5.0	1	1	1.00	20.00	1	1.00	100.00
2.08.2.02.01.15.31	Bimbingan Teknis Sinkronisasi Kebijakan Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Peserta	120.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.08.2.02.01.15.33	Peningkatan Jejaring Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Jumlah Peserta	120.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2.08.2.02.01.15.34	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen	4.0	0	1	1	25.00	1	1	100.00
2.08.2.02.01.15.35	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Jumlah Dokumen	4.0	0	1	1.00	25.00	1	1.00	100.00
2.08.2.02.01.15.36	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah peserta	120.0	0	30	30	25.00	30	30	100.00
2.08.2.02.01.15.37	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta	120.0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

Kode	Urusan / Fungsi Penunjang Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2017	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program /Kegiatan (Renja PD Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD Tahun 2019	
					Target Kinerja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08.2.02.01 - 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Cakupan layanan terhadap kasus anak/remaja pengguna NAPZA (%)	600.0	200	100	0	16.67	100	0	0.00
2.08.2.02.01.21.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Jumlah Peserta	2,400.0	0	600	600	25.00	600	600	100.00
2.08.2.02.01 - 25	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Cakupan penguatan Kelembagaan Kb di masyarakat(%)	600.0	200	100	0	16.67	100	0	0.00
2.08.2.02.01.25.06	Peningkatan Kualitas S DM	Jumlah Peserta	400.0	0	100	100	25.00	100	100	100.00

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, maupun terhadap IKK yang tertuang dalam Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya diterangkan jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan renstra SKPD dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan. Kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam lingkup Pengarusutamaan Gender (PUG)
  - a) Kebijakan berupa Peraturan Daerah
  - b) Penguatan Kapasitas Jaringan Pengarusutamaan Gender melalui Sosialisasi PUG mengenai konsep gender, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), Anggaran Responsif Gender (ARG), Pelatihan Fasilitator PUG dan Pelatihan Pendampingan dan Advokasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Pendampingan dan konsultasi penyusunan Renstra/Renja SKPD yang responsif gender.
  - c) Ketersediaan data gender dan anak.
  - d) Kemitraan dan jaringan antara organisasi yang ada di dalam dan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
  - e) Integrasi pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan utama pembangunan, sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional agar pembangunan yang dilaksanakan di tiap sektor dapat saling berkorelasi dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat (laki-laki maupun perempuan) dengan memperhatikan aspek kesetaraan, keadilan dan keberlanjutan.
2. Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak
  - a) Upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak yang bersifat pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan daerah ini bersifat spesifik hanya memberikan perlindungan kepada Perempuan dan anak korban dan Gugus Tugas

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b) Upaya pengembangan lembaga layanan melalui penguatan dan peningkatan kapasitas jaringan serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menangani upaya pencegahan dan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Dengan didukung alokasi anggaran dari pemerintah daerah, masyarakat dan peran serta dunia usaha secara terus menerus dan berkelanjutan.
  - c) Data terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disediakan oleh lembaga layanan perempuan dan anak berupa UPT perlindungan Perempuan dan Anak dan yang selanjutnya diformulasikan oleh DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilaporkan setiap tahunnya.
  - d) Lembaga layanan untuk perlindungan perempuan dan pemenuhan hak nya diantaranya adalah UPT PPA, LSM pemerhati perempuan dan berbagai panti sosial dan pusat rehabilitasi milik Instansi Vertikal.
  - e) Kebijakan Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak antara lain dengan adanya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak diharapkan mampu menjadi pijakan dalam rangka memperkuat komitmen dan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak
3. Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Program Keluarga Berencana bertujuan menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan antara lain melalui pengendalian kelahiran. Adapun kegiatan tersebut yaitu Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB Nasional. Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program KB Nasional ditujukan untuk meningkatkan KIE Program KB.
  - b) Kegiatan meningkatkan kemandirian dan kualitas keluarga di masyarakat dalam melaksanakan program KB dan meningkatkan keluarga bahagia dan sejahtera.
  - c) Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB yang telah dilaksanakan adalah kegiatan khusus seperti Hari Keluarga Nasional (Harganas).

Pencapaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **tabel 2.2** sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>											
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)		12,30	10,88	11,36	11,83	12,30	6,50	6,34	11,83	12,30	
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)		29,62	23,59	25,60	27,61	29,62	88,76	80,85	27,61	29,62	
11.3	Rasio KDRT		0,012	0,0213	0,0182	0,0151	0,012	0,0088	11,25	0,0151	0,012	
11.4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)		0,00	0,23	0,15	0,08	0,00	7,56	0,00	0,08	0,00	
11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)		57,18	54,09	55,12	56,15	57,18	53,61	56,60	56,15	57,18	

NO	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)		100	100	100	100	100	100	100,00	100	100	
11.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		80,22	78,57	79,31	79,67	81,88	77,87	77,03*	79,67	81,88	
11.8	Indek Pembangunan Gender (IPG)		90,00	89,54	89,67	89,88	91,34	89,25	89,13*	89,88	91,34	
<b>12</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>											
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga		1,50	1,20	1,30	1,40	1,50	0,58	2,29	1,40	0,58	
12.2	Rasio akseptor KB		83,29	80,60	81,49	82,39	83,29	79,21	77,44	82,39	79,21	
12.3	Cakupan peserta KB aktif (Orang)		425.000	394.756	403.585	412.413	425.000	373.140	354.667	412.413	373.140	

NO	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		148.072	164.891	159.285	153.678	148,072	243.211	239.863	153.678	148,072	

Keterangan :

\*Data *update* di akhir tahun 2018

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
9. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;

10. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;
12. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelemagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi ;

14. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. penyerasian kebijakan kependudukan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian, antara lain :

*Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai dengan tahun 2019 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan belum dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat

2. Perlakuan Diskriminatif Tenaga kerja perempuan

Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, jaminan kesehatan akibat kerja adalah menjadi tanggungan pribadi tenaga kerja perempuan. Sedangkan yang bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir, dan lain-lain. Kerugian lain yakni dari pemotongan pajak lebih besar dari pada tenaga kerja laki-laki, karena perempuan dianggap berstatus lajang.

3. Rendahnya Peran Perempuan di Sektor Politik dan pengambilan keputusan

Perlunya peran perempuan dan upaya memperkuat Kelembagaan, Pengarusutamaan Gender didalam pembangunan : Masih rendahnya akses perempuan terhadap pembangunan di sektor publik maupun jabatan-jabatan politik. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya

#### 4. Produktivitas Ekonomi Perempuan Belum Optimal

Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender. Penurunan tingkat kemiskinan untuk rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L).

Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Kenaikan TPAK perempuan tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka, sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, pertama, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan keahlian, keterampilan dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami perlindungan yang kurang optimal. Perlunya program perempuan pengembang ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi perempuan dan juga perlunya program peningkatan peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### 5. Kelembagaan Pengarusutamaan gender yang belum maksimal

Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari: 1) Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan; 2) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan 3) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota

#### 6. Permasalahan Pembangunan Perlindungan Anak

- a. Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es. Jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya

- b. Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum ditangani dengan baik  
Pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orangtua yang memiliki ABK menyebabkan keluarga/orangtua malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Di samping itu, jumlah guru di sekolah-sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas sehingga banyak yang tidak dapat bersekolah di sekolah umum
- c. Permasalahan sosial anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain anak yang mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat (konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDs, perkawinan usia anak dan anak di daerah minoritas/terisolasi. Masalah sosial yang dialami anak pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik
- d. Pada anak yang berhadapan dengan hukum, di seluruh institusi atau tingkat peradilan, aparat penegak hukum (APH) memperlakukan anak seperti orang dewasa
- e. Belum semua program dan kegiatan pembangunan baik di K/L dan Pemda selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA), masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif. Hal ini terlihat dari: 1) Meningkatnya prevalensi kekerasan pada anak; 2) Masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan/ kebijakan terkait perlindungan anak dan belum lengkapnya aturan pelaksanaan suatu undang-undang; serta 3) Masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada.
- f. Masih tingginya angka usia pernikahan anak, terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak, dan masih banyaknya anak terlantar tanpa adanya pengasuhan orang tua atau orang tua pengganti, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua dalam memberikan pengasuhan berkualitas kepada anaknya melalui pemenuhan hak anak dengan kasih sayang tanpa kekerasan.

- g. Masih tingginya angka drop-out sekolah, masih rendahnya angka partisipasi sekolah, belum optimalnya kualitas pendidikan baik dilihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, masih tingginya kekerasan terhadap anak di sekolah, masih sedikitnya sekolah yang menuju Sekolah Ramah Anak (SRA), belum tersedianya Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS), terbatasnya ruang kreativitas anak di luar sekolah, terbatasnya ruang bermain ramah anak, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua akan pentingnya pemenuhan hak anak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri anak. Demikian pula dengan negara, masyarakat dan dunia usaha belum optimal untuk mewujudkan hak anak untuk memanfaatkan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya secara optimal. Selain itu, juga belum tersedia panduan bagi semua individu yang bekerja dengan anak dalam ranah bermain dan rekreasi yang ramah anak.
  - h. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak (PRA).
  - i. perlunya penguatan Forum anak/kelompok anak di tingkat Kabupaten karena belum semua kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak.
  - j. perlunya peningkatan kualitas hidup anak melalui fasilitasi kebijakan Kabupaten Layak Anak karena belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju KLA.
  - k. perlunya pengembangan Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
  - l. perlunya sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD.
7. Permasalahan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program
  - b. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilih termasuk data anak
  - c. Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
  - d. Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat

- e. Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- f. Belum optimalnya penelaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### *Urusan Keluarga Berencana*

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan Keluarga Berencana adalah belum adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan urusan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah mengamanatkan bahwa pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini diharapkan semakin mendorong dan memperkuat BKKBD di Kabupaten/kota sebagaimana yang juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Terlepas dari hal tersebut diatas, permasalahan yang masih terdapat dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Aspek kependudukan belum menjadi prioritas utama
2. Metode fasilitasi dan mekanisme operasional dilapangan dalam pelaksanaan Program KB belum optimal
3. Sarana dan prasarana pelayanan operasional, pembinaan dan penggerakan masih kurang
4. Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan;
5. Kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam mendukung program masih kurang
5. Tingginya penggunaan alat kontrasepsi non MKJP.
6. Tingginya angka kehamilan/kelahiran pada usia remaja (15-19 tahun).
7. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilakuberesiko masih rendah.

8. Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja;
9. Masih tingginya jumlah keluarga miskin;
10. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
11. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB.
12. Belum seluruh kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang Pengendalian Penduduk dan Kb dimasukkan dalam perencanaan daerah;
13. Penguatan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota;

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah**

Pengukuran tingkat capaian kinerja DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dengan realisasinya.

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Tingkat capaian kinerja DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

Tabel 2.3.  
Tingkat capaian kinerja DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019

No	Sasaran	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Implementasi Pengarustamaan Gender	75 %
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan public dan pendapatan keluarga	211,40 %
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	61.807 %

No	Sasaran	Tingkat Capaian
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100 %
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	3.341,59
6	Meningkatnya kualitas perlindungan khusus kepada anak	58,06 %
7	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	218,20%
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	100 %
9	Menurunnya angka kelahiran	99,78 %
10	Meningkatnya akseptor KB	94,60 %
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	164,27 %
	<b>Rata-rata persentase Capaian Sasaran</b>	<b>197,78 %</b>

Tingkat capaian indikator kinerja DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.  
Tingkat capaian indikator kinerja DP3A-PPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2019			
			Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang	Persentase ARG pada Belanja langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	1,28	0,96	75
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan public dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Persen	28,89	35,55	123,05
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Persen	33,36	100	299,76
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	rasio	0,0182	11,249	61.807
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan	Persentase perempuan korban kekerasan yang	persen	100	100	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2019			
			Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	terhadap perempuan termasuk TPPO	terlayani sesuai standar				
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	persen	35,71	14,29	40,0
		Rasio anak korban kekerasan	rasio	0,0213	1,3724	6443,19
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus pada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standart	persen	100	58,06	58,06
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki system data gender dan anak	persen	11,11	24,24	218,20
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penil;aian SAKIP	skor	B	B	100
9	Menurunnya Angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,28	2,29	99,56

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Susunan Organisasinya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Kepala Dinas , membawahi 1 ( satu ) Sekretaris dan 5 (lima) Bidang.

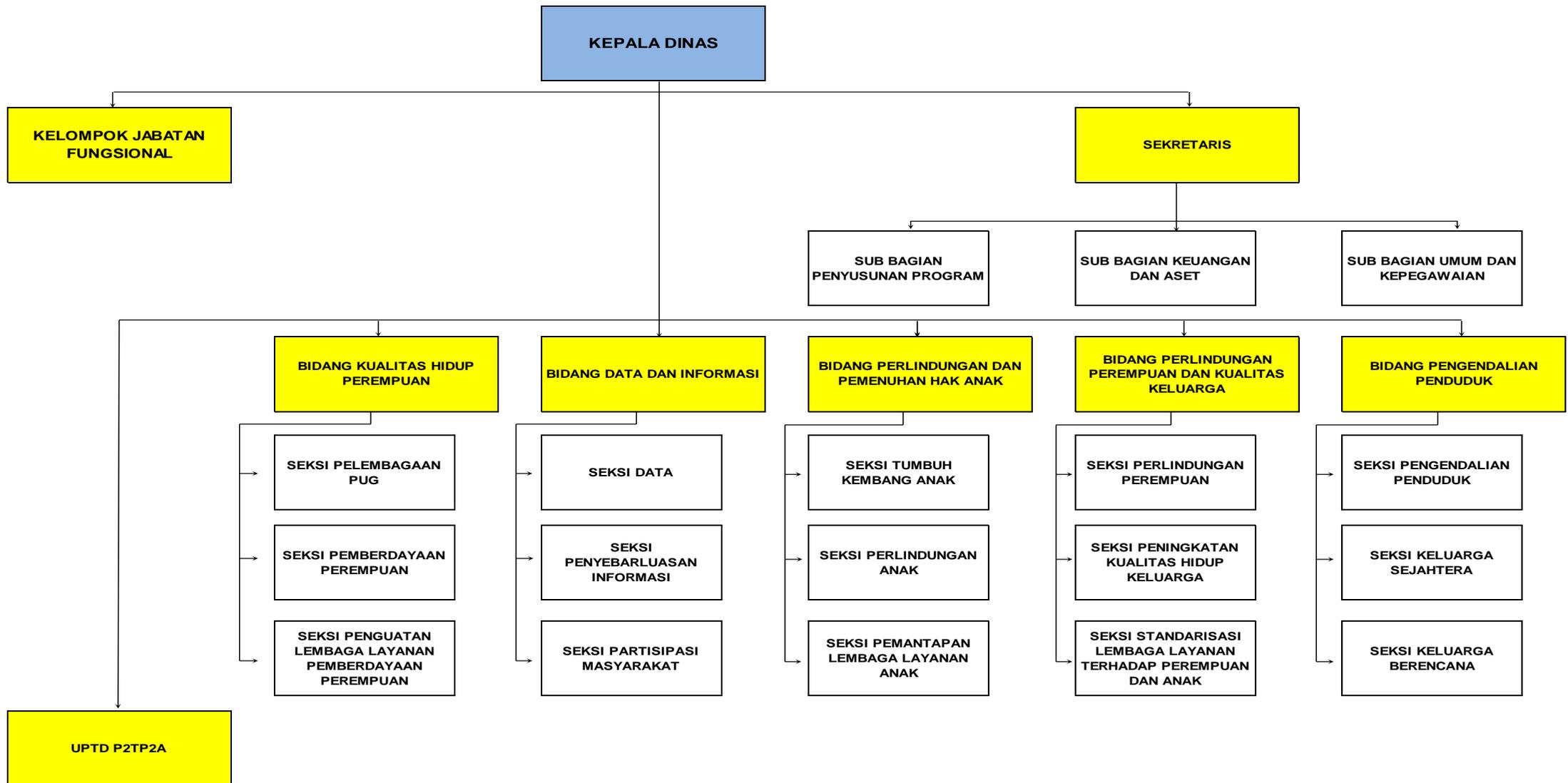
a. Sekretaris, membawahi 3 ( tiga ) Sub Bagian :

- Sub Bagian Penyusunan Program;

- Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- b. Bidang Kesetaraan Gender, membawahi 3 (tiga) Seksi :
- Seksi Pemantapan Kelembagaan PUG;
  - Seksi Pemantauan dan Evaluasi PUG;
  - Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.
- c. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat , membawahi 3 (tiga) Seksi:
- Seksi Data;
  - Seksi Penyebarluasan Informasi;
  - Seksi Partisipasi Masyarakat.
- d. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, membawahi 3 (tiga) Seksi :
- Seksi Tumbuh Kembang Anak;
  - Seksi Perlindungan Anak;
  - Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak.
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, membawahi 3 (tiga) Seksi :
- Seksi Perlindungan Perempuan
  - Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga;
  - Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi 3 (tiga) Seksi :
- Seksi Pengendalian Penduduk;
  - Seksi Kesehatan Reproduksi;
  - Seksi Keluarga Berencana.

Yang disajikan dalam susunan **Struktur Organisasi** sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



### **2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah**

#### **Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi**

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- Masih banyaknya kebijakan operasional pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dan keluarga berencana yang masih perlu ditelaah dan disinergikan;
- Masih kurangnya pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan perempuan, anak, ketahanan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Masih lemahnya koordinasi baik lintas sektor maupun lintas program dalam rangka pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
- Masih lemahnya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan kadilam dan hak asasi serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa dikerjakan dengan cepat bahkan terlambat, sehingga dapat menghambat persiapan maupun pelaksanaan kegiatan;
- Perlunya menanamkan persepsi masyarakat tentang Pengarusutamaan gender, Perlindungan Terhadap perempuan dan anak perlindungan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan pentingnya hal tersebut dalam aspek kehidupan terutama pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu secara khusus Bidang PUG, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat terus berinovasi untuk membuat perencanaan program kegiatan .

### **Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi**

- Koordinasi yang masih fersial sehingga menghambat dalam proses pelayanan publik;
- Tingkat pemahaman aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
- Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

### **A. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

- Tanggung jawab terhadap kemajuan daerah melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan mengalami proses yang panjang untuk terlaksana.
- Upaya pengawasan terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi kerakyatan perlu peningkatan
- Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat belum maksimal dikarenakan hal ini sangat menentukan penilaian masyarakat tentang pelayanan dari aparatur negara dan keberhasilan Kepala Daerah khususnya.

### **B. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah**

#### **Tantangan**

- Dengan adanya Kesenjangan/Ketidaksetaraan sangat penting untuk melakukan review peraturan perundang-undangan agar tidak bias gender dan tidak diskriminasi
- Konflik peran sangat mempengaruhi strategi perlindungan perempuan dan anak
- Disparitas Indek Pembangunan Gender antar wilayah yang menunjukkan angka yang bervariasi, namun antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah hal itu belum maksimal digambarkan/dipetakan.
- Masih tingginya angka kemiskinan merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan IPG

- Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utama Gender (PUG)
- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
- Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja
- Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah
- Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
- Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak
- Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB

### **Peluang**

- Menguatnya isu Gender
- Banyaknya dukungan dari masyarakat terhadap program PUG dan PUHA
- Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial
- Tersedianya Organisasi-organisasi yang peduli akan pemberdayaan perempuan
- Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja
- Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Kemajuan teknologi informasi
- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana
- Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.

- Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
- Kemudahan informasi tentang KB
- Animo masyarakat untuk ber KB cukup tinggi
- Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007

### **Kekuatan**

- Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di DP3APP-KB (SOP, SPM, Perda, Pergub dll)
- Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal
- SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja
- Tersedianya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Terbentuknya jejaring kelembagaan
- Koordinasi yang baik dengan Kabupaten/kota dan SKPD terkait

### **Kelemahan**

- Kurang optimalnya sarana dan prasarana
- koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan SKPD terkait masih belum optimal
- Reward and Punishment belum berjalan optimal
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif
- Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal
- Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal
- Anggaran masih terbatas
- Tupoksi masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal
- Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
- Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender

- Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan

### **C. Isu-isu strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah**

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

#### **Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

1. Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
  - a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
  - b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO
  - c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
2. Perlindungan Anak :
  - a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
  - b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
  - c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

#### **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan Tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor KB
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja

6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi penindung anak-anak untuk berkembang

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

RKPD memuat evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran RPJMD. Dengan demikian, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD, namun tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan dan isu-isu pembangunan mutakhir. Capaian kinerja RKPD selama 5 (lima) tahun harus dapat menjawab dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang telah ditetapkan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengacu pada arah pembangunan tahunan 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018. Disatu sisi, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2020 ini memperhatikan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah maka DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan memperhatikan kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dalam melaksanakan review rancangan awal RKPD proses yang dilakukan adalah

membandingkan antara rancangan awal RKPD tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan banyak terdapat perbedaan antara lain :

- Tidak semua kegiatan yang ada dalam rancangan awal RKPD dapat dilaksanakan
- Terdapat beberapa indikator kinerja yang harus disesuaikan
- Besarnya dana dalam rancangan awal RKPD
- *Adanya program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Awal RKPD\**

Untuk lebih jelasnya review rancangan RKPD tahun 2020 terhadap hasil analisa kebutuhan pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 2.3** sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

**PD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>2,428,675,000.00</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2,862,377,000</b>	
	Penyediaan jasa surat menyurat	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan layanan jasa surat menyurat	12 Bulan	7,000,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	7,000,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	148,816,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	148,816,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah bulan penyediaan biaya /jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	130,946,000.00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	130,946,000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan layanan jasa administrasi keuangan bagi aparatur	12 Bulan	906,674,000.00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	906,674,000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan layanan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	34,156,000.00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	34,156,000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan biaya /jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	20,000,000.00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	20,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan alat tulis kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	50,000,000.00	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 bulan	50,000,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan biaya cetak dan penggandaan	12 Bulan	45,000,000.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	45,000,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah bulan penyediaan komponen listrik kantor	12 bulan	50,000,000.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 bulan	50,000,000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	196,130,000.00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	jumlah paket	1 Paket	396,130,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 bulan	91,780,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 bulan	91,780,000	
	Penyediaan makanan dan minuman	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman bagi aparatur	12 Bulan	30,000,000.00	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	30,000,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	LUAR PROVINSI	jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas / koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	406,298,000.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah bulan	12 Bulan	640,000,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas / koordinasi ke dalam daerah	12 Bulan	311,875,000.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah bulan	12 Bulan	311,875,000	
	<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>2,689,254,000.00</b>	<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>17,743,000,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah paket pengadaan / unit	1 unit	2,013,000,000.00	Pembangunan gedung kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah paket pengadaan / unit	1 unit	13,000,000,000	
	Pengadaan mobil jabatan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah paket pengadaan / unit	1 Unit	461,000,000.00	Pengadaan mobil operasional	Kota Palangka Raya	Jumlah paket pengadaan / unit	3 unit	900,000,000	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Unit	2 Unit	54,000,000.00	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kota Palangka Raya	Jumlah Unit	2 Unit	60,000,000	
	Pengadaan Meubelair	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah paket pengadaan meubelair kantor	1 Paket	64,000,000.00	Pengadaan Meubelair	Kota Palangka Raya	Jumlah paket pengadaan meubelair kantor	1 Paket	3,500,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah unit pemeliharaan	1 Unit	30,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Palangka Raya	jumlah unit pemeliharaan	1 Unit	100,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah unit pemeliharaan	1 Unit	47,254,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	Kota Palangka Raya	jumlah unit pemeliharaan	1 Unit	98,000,000	
	Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Lokasi penataan halaman dan kebun hortikultura	1 Lokasi	20,000,000.00	Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	Kota Palangka Raya	Jumlah Lokasi penataan halaman dan kebun hortikultura	1 Lokasi	85,000,000	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>127,775,000.00</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>127,775,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian olahraga	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah pakaian olahraga / orang	78 Stel	53,650,000.00	Pengadaan Pakaian olahraga	Kota Palangka Raya	Jumlah pakaian olahraga / orang	78 Stel	53,650,000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah pakaian dinas / orang	78 Stel	74,125,000.00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah pakaian dinas / orang	78 Stel	74,125,000	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>78,167,000.00</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>325,000,000</b>	
	Pendidikan dan pelatihan formal	KOTA PALANGKA RAYA	Penyediaan dana pelatihan dan diklat bagi aparatur	12 Bulan	46,167,000.00	Pendidikan dan pelatihan formal	Kota Palangka Raya	Penyediaan dana pelatihan dan diklat bagi aparatur	12 Bulan	250,000,000	
	Rapat koordinasi perencanaan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan dalam 1 tahun	4 Kali	32,000,000.00	Rapat koordinasi perencanaan	Kota Palangka Raya	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan dalam 1 tahun	4 Kali	75,000,000	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>360,265,000.00</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>957,015,000</b>	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun	1 Dokumen	9,204,000.00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	jumlah dokumen laporan capaian kinerja	1 Dokumen	9,204,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								yang tersusun			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	9,561,000.00	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	9,561,000	
	Penyusunan RKA-SKPD	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah dokumen RKA yang tersusun	2 Dokumen	18,250,000.00	Penyusunan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	jumlah dokumen RKA yang tersusun	2 Dokumen	45,000,000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Bulan	12 Bulan	130,000,000.00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Bulan	12 Bulan	260,000,000	
	Penyusunan renja SKPD	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah dokumen Renja PD yang tersusun	2 Dokumen	18,250,000.00	Penyusunan renja SKPD	Kota Palangka Raya	jumlah dokumen Renja PD yang tersusun	2 Dokumen	18,250,000	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perencana	Luar Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perencana	Luar Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	
	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	175,000,000.00	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	2 dokumen	350,000,000	
	Penyusunan dokumen ARG DP3APPKB	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Penyusunan dokumen ARG DP3APPKB	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan</b>				<b>22,650,000.00</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan</b>				<b>22,650,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>					<b>Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>					
	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan aset/ barang milik daerah	12 Bulan	22,650,000.00	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan aset/ barang milik daerah	12 Bulan	22,650,000	
	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>				<b>1,648,890,900.00</b>	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>				<b>11,986,149,100</b>	
	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah rapat koordinasi	1 Kegiatan	200,000,000.00	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rapat koordinasi	3 Kegiatan	1,300,000,000	
	Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Bulan	12 Bulan	0	Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Bulan	12 Bulan	8,041,149,100	
	Sosialisasi RAD PUG Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Sosialisasi RAD PUG Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	
	Sosialisasi Advokasi PUG di Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	Sosialisasi Advokasi PUG di Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	210,000,000	
	Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tingkat Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tingkat Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rakor Pokja PUG Kab./Kota se-Kalteng	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	175,000,000.00	Rakor Pokja PUG Kab./Kota se-Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	
	Sosialisasi Pembentukan Pokjatab dan Satgas PKDRT se Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	40 Orang	0	Sosialisasi Pembentukan Pokjatab dan Satgas PKDRT se Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	40 orang	50,000,000	
	Rapat Koordinasi Tim Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi	1 Dokumen	0	Rapat Koordinasi Tim Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi	1 Dokumen	150,000,000	
	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se- Kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi	1 Dokumen	130,379,500.00	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se- Kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi	1 Dokumen	0	
	Rapat-Rapat Koordinasi Pemantapan Lembaga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Rapat-Rapat Koordinasi Pemantapan Lembaga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	
	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi	1 Dokumen	300,000,000.00	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi	1 Dokumen	350,000,000	
	Rakornas Forum Anak Nasional	LUAR PROVINSI	Jumlah dokumen rakornas forum anak tingkat nasional	1 Dokumen	300,000,000.00	Rakornas Forum Anak Nasional	Luar Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen rakornas forum anak tingkat nasional	1 Dokumen	350,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah dokumen monev	1 Dokumen	105,504,150.00	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen monev	1 Dokumen	250,000,000	
	Rapat Koordinasi Pokjatat Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dokumen rapat koordinasi pokjatat GSI	1 Dokumen	57,971,250.00	Rapat Koordinasi Pokjatat Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen rapat koordinasi pokjatat GSI	1 Dokumen	150,000,000	
	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen rapat koordinasi	1 Dokumen	160,036,000.00	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen rapat koordinasi	1 Dokumen	120,000,000	
	Sosialisasi Kebijakan PUG	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Sosialisasi Kebijakan PUG	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	75,000,000	
	Sosialisasi Kebijakan ARG	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Sosialisasi Kebijakan ARG	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	75,000,000	
	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	
	Monev PUG di Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen Monev	1 Dokumen	120,000,000.00	Monev PUG di Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/Kota	14 Kab/Kota	250,000,000	
	Penyuluhan Tentang Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000.00	Penyuluhan Tentang Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan terhadap Posyandu melalui gerakan Sayang Ibu	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Pembinaan terhadap Posyandu melalui gerakan Sayang Ibu	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	
	Rapat Forum Gugus Tugas TPPO	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Rapat Forum Gugus Tugas TPPO	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	
	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>				<b>111,199,000.00</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>				<b>725,000,000</b>	
	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	54,199,000.00	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	
	Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah SKPD	45 SKPD	0	Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah SKPD	45 SKPD	70,000,000	
	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen pemantauan dan koordinasi Jejaring Kelembagaan	1 Dokumen	57,000,000.00	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	
	Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD dan Aplikasi ARG di SKPD	Luar Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD dan Aplikasi ARG di SKPD	Luar Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	
	TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	20 Orang	0	TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	20 orang	125,000,000	
	Pelatihan ARG bagi Focal Point SKPD Provinsi	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	40 Orang	0	Pelatihan ARG bagi Focal Point SKPD Provinsi	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	40 orang	50,000,000	
	Pelatihan Bagi Tim Teknis ARG	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	20 Orang	0	Pelatihan Bagi Tim Teknis ARG	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	20 orang	50,000,000	
	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan</b>				<b>874,645,100.00</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>				<b>2,155,000,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Perlindungan Perempuan</b>										
	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	250,000,000.00	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	
	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Peserta	2 Kegiatan	100,000,000.00	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	
	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	327,384,400.00	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	
	Sosialisasi Advokasi Layanan P2TP2A	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Peserta	100 Orang	96,925,000.00	Sosialisasi Advokasi Layanan P2TP2A	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Peserta	100 Orang	500,000,000	
	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah/Frekuensi Kegiatan Promosi	4 Kegiatan	40,335,700.00	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah/Frekuensi Kegiatan Promosi	4 Kegiatan	100,000,000	
	Pembinaan Terhadap Posyandu Melalui Penguatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Kegiatan pembinaan	1 Kegiatan	60,000,000.00	Pembinaan Terhadap Posyandu Melalui Penguatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Kegiatan pembinaan	1 Kegiatan	300,000,000	
	Pemilihan Putra dan Putri Duta Gender Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	0	Pemilihan Putra dan Putri Duta Gender Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	150,000,000	
	Pengembangan Forum Kerja Perlindungan Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Pengembangan Forum Kerja Perlindungan Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Layanan Terpadu Korban Kekerasan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	30 Orang	0	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Layanan Terpadu Korban Kekerasan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	30 orang	250,000,000	
	Pelatihan Satgas PKDRT	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	60 Orang	0	Pelatihan Satgas PKDRT	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	60 orang	150,000,000	
	Sosialisasi dan Advokasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Sosialisasi dan Advokasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 orang	50,000,000	
	Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan <i>Trafficking</i>	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan <i>Trafficking</i>	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 orang	50,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan anak di Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan anak di Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Tindak kekerasan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Tindak kekerasan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	
	Sosialisasi Perlindungan Perempuan Berkebutuhan Khusus dalam Keadaan Darurat	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Sosialisasi Perlindungan Perempuan Berkebutuhan Khusus dalam Keadaan Darurat	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 orang	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah/Frekuensi Kegiatan Promosi	4 Kegiatan	0	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah/Frekuensi Kegiatan Promosi	4 Kegiatan	50,000,000	
	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>				<b>475,000,000.00</b>	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>				<b>3,195,000,000</b>	
	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	230,000,000.00	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	260,000,000	
	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen promosi	1 Dokumen	150,000,000.00	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Promosi	2 Promosi	300,000,000	
	Pembentukan Kaukus Perempuan Provinsi Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kaukus	1 Kaukus	0	Pembentukan Kaukus Perempuan Provinsi Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kaukus	1 Kaukus	100,000,000	
	Capacity Building Bagi Perempuan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Peserta	50 Orang	50,000,000.00	Capacity Building Bagi Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	
	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Peserta	30 Orang	45,000,000.00	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Peserta	30 Orang	0	
	Pelatihan keterampilan Dalam rangka Peningkatan ekonomi keluarga untuk menuju keluarga yang berkualitas	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Pelatihan keterampilan Dalam rangka Peningkatan ekonomi keluarga untuk menuju keluarga yang berkualitas	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 orang	250,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi Bagi Perempuan Pelaku Usaha di Bidang Industri Rumahan	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi Bagi Perempuan Pelaku Usaha di Bidang Industri Rumahan	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 orang	100,000,000	
	Pelatihan Pembekalan Anggota Legislatif (ALEG) Perempuan Terpilih Pemilu 2019	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	80 Orang	0	Pelatihan Pembekalan Anggota Legislatif (ALEG) Perempuan Terpilih Pemilu 2019	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	80 Orang	250,000,000	
	Pembinaan Kelompok Perempuan Dalam Bentuk UKM	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Pembinaan Kelompok Perempuan Dalam Bentuk UKM	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 orang	250,000,000	
	Sosialisasi/Advokasi pemetaan lembaga/organisasi Masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Orang	0	Sosialisasi/Advokasi pemetaan lembaga/organisasi Masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	
	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</b>				<b>436,654,000.00</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</b>				<b>680,000,000</b>	
	Seminar dan Penyuluhan tentang Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	157,000,000.00	Seminar dan Penyuluhan tentang Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	
	Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen Monev	1 Dokumen	50,000,000.00	Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Monev	1 Dokumen	80,000,000	
	Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	229,654,000.00	Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi/Advokasi pencegahan perkawinan Anak	Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Sosialisasi/Advokasi pencegahan perkawinan Anak	Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	
	Sosialisasi Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kabupaten	Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Sosialisasi Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kabupaten	Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	
	<b>Program Penyusunan Profil Lembaga</b>				<b>369,643,000.00</b>	<b>Program Penyusunan Profil Lembaga</b>				<b>1,095,000,000</b>	
	Surveilans Data Terpilah Gender dan Anak Bagi Anggota Forum Data Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	1 Dokumen	0	Surveilans Data Terpilah Gender dan Anak Bagi Anggota Forum Data Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	
	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi	31,549,700.00	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi	75,000,000	
	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	113,093,300.00	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	Kota Palangka Raya	Buku/Dokumen	1 Dokumen	175,000,000	
	Penyusunan Buku Panduan Penyusunan data Terpilah Gender Dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Buku/Dokumen	1 Dokumen	0	Penyusunan Buku Panduan Penyusunan data Terpilah Gender Dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Buku/Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	
	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan	12 Bulan	100,000,000.00	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	175,000,000	
	Sosialisasi Hasil Penyusunan Data Terpilah Gender Dan Anak	Kabupaten /Kota	Jumlah Peserta	26 Orang	0	Sosialisasi Hasil Penyusunan Data Terpilah Gender Dan Anak	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	26 Orang	150,000,000	
	Pengembangan PPID (Pejabat Pengelola	Kota Palangka Raya	Jumlah Bulan	12 Bulan	125,000,000.00	Pengembangan PPID (Pejabat Pengelola	Kota Palangka Raya	Jumlah Bulan	12 Bulan	150,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Informasi dan Dokumentasi)					Informasi dan Dokumentasi)					
	Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak ( Forum PUSPA)	Kota Palangka Raya	Jumlah Forum	1 Forum	0	Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak ( Forum PUSPA)	Kota Palangka Raya	Jumlah Forum	1 Forum	260,000,000	
	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				<b>2,683,000,000</b>	
	<b>Program Keluarga Berencana</b>				<b>518,765,500.00</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>				<b>2,033,000,000</b>	
	Pelayanan KIE	KABUPATEN KATINGAN	Jumlah Dokumen pelaksanaan KIE	1 Dokumen	75,000,000.00	Pelayanan KIE	Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pelaksanaan KIE	120 orang	125,000,000	
	Promosi Keikutsertaan Ber-KB pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Kabupaten /Kota	Jumlah Peserta	120 Orang	0	Promosi Keikutsertaan Ber-KB pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	120 orang	125,000,000	
	Promosi Kepedulian KB	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Peserta	30 Orang	64,200,000.00	Promosi Kepedulian KB	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	100 orang	100,000,000	
	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	KABUPATEN GUNUNG MAS	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	55,365,500.00	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	200 orang	200,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan Teknis Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	60 Orang	0	Bimbingan Teknis Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	60 orang	120,000,000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk Kalimantan Tengah	Kabupaten /Kota	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	0	Pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk Kalimantan Tengah	Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	1 Dokumen	150,000,000	
	Sosialisasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kab/Kota	Kabupaten /Kota	Jumlah Peserta	100 Orang	0	Sosialisasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	100 orang	100,000,000	
	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	35,000,000.00	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pusat/Provinsi/Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	
	Bimbing Teknis Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	40 Orang	0	Bimbing Teknis Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	40 orang	90,000,000	
	Peningkatan Jejaring Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	41 Orang	0	Peningkatan Jejaring Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	41 orang	90,000,000	
	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75,000,000.00	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	
	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000.00	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	175,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Ormas dalam pemabangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten /Kota	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Ormas dalam pemabangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	50 Orang	100,000,000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Ormas dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten /Kota	Jumlah Peserta	40 Orang	0	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Ormas dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	40 Orang	75,000,000	
	Promosi dan Kampanye tentang Delapan Fungsi Keluarga di Kampung KB	Kabupaten /Kota	Jumlah Peserta	40 Orang	0	Promosi dan Kampanye tentang Delapan Fungsi Keluarga di Kampung KB	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	40 Orang	75,000,000	
	Pembinaan Ketahanan Keluarga pada Kegiatan Momentum Keluarga Berencana	LUAR PROVINSI	Jumlah Peserta	30 Orang	64,200,000.00	Pembinaan Ketahanan Keluarga pada Kegiatan Momentum Keluarga Berencana	Pusat/Provinsi/Kabupaten /Kota	Jumlah Peserta	50 Orang	200,000,000	
	Pertemuan Koordinasi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Pertemuan Koordinasi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 Orang	75,000,000	
	Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam Pemberdayaan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam Pemberdayaan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 Orang	83,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>				<b>168,416,500.00</b>	<b>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>				<b>300,000,000</b>	
	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Peserta	400 Orang	168,416,500.00	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	300 Orang	300,000,000	
	<b>Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</b>				0	<b>Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</b>				<b>350,000,000</b>	
	Peningkatan Kualitas SDM	Kabupaten /Kota	Jumlah Peserta	100 Orang	0	Peningkatan Kualitas SDM	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	100 orang	100,000,000	
	Rapat Koordinasi Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	100 Orang	0	Rapat Koordinasi Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	100 orang	250,000,000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

forum OPD sebagai sarana dua arah atau wadah organisasi dalam memberikan ruang bagi masyarakat, stakeholders, lembaga dinas/ instansi terkait dalam berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyusun dan merencanakan program kerja pembangun untuk tahun 2019. Sebagai OPD yang menangani dan terkait terhadap isu-isu strategis pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, Rancangan rencana kerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didiskusikan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan-usulan tersebut disajikan pada **tabel 2.6** :

**Tabel 2.6**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan tahun 2021**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>					
1.	Penyusunan kebijakan daerah tentang pembinaan ketahanan keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen	1	
2.	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan keluarga sejahtera Tk.Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah unit	1	
3.	Pembinaan dan bimbingan penguatan kelompok kegiatan Tk. Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	50	
4.	Promosi tentang pengasuhan dan Tumbuh kembang anak Tk. Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	50	
5.	Promosi dan Sosialisasi menjadi orang tua hebat dalam pengasuhan anak Tk.Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	40	
6.	Pembinaan remaja tentang generasi berencana Tk. Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	40	
7.	Pembinaan peningkatan akses PIK Remaja Tk. Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Lembaga	40	
8.	Pembinaan lembaga pelayanan keluarga sejahtera Tk.Prov.	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Lembaga	30	
9.	Pemberian bantuan pengembangan UPPKS	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Unit	30	
10.	Promosi dan kampanye tentang delapan fungsi keluarga di kampung KB	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	40	
11.	Pembinaan ketahanan keluarga pada kegiatan momentum	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	30	

<b>No.</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
12.	Pertemuan Koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan keluarga (orang)	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	30	
13.	Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam pemberdayaan keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah orang	30	
14.	Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah unit	50	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kemen PPPA merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2019–2024 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019–2024. RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI yang telah dijanjikan pada masa kampanye Pemilu Presiden RI pada tahun 2019.

##### **Visi Kemen PPPA**

Visi Kemen PPPA mengacu pada Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yaitu *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*

Untuk mewujudkan Visi Pemerintahan Kabinet Kerja tersebut, Kemen PPPA sebagai salah satu dari Kabinet Kerja yang memberikan kontribusi strategis untuk membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

*Pertama*, mewujudkan Indonesia yang berdaulat dengan tekad dan komitmen para penentu kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta peranserta masyarakat, melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak guna mempercepat peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki. Kemen PPPA akan berperan penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat melalui peningkatan kualitas kemampuan bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa diskriminasi dan atau kekerasan dengan semangat gotong royong.

*Kedua*, kemandirian suatu bangsa merupakan keniscayaan sehingga segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan secara sendiri. Pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar pemangku kepentingan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender. Kemen PPPA berkontribusi mewujudkan kemandirian suatu bangsa melalui ketersediaan sumber daya manusia baik perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan dengan semangat gotong royong.

*Ketiga*, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan jati diri sebagai identitas bangsanya. Hal ini bisa diwujudkan oleh Pemerintah

bersama masyarakat dalam mengelola nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi kekuatan suatu bangsa. Kemen PPPA senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan kebijakan bersama K/L dan Pemda dalam rangka mengakselerasikan pembangunan bangsa yang berkepribadian dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan semangat gotong royong.

### **Misi Kemen PPPA**

Misi Kemen PPPA mengacu pada Misi Kabinet Kerja yang dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan negara di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misi ini menjadi acuan utama untuk menggerakkan segala potensi dan sumberdaya serta modalitas lainnya guna mencapai kinerja yang lebih optimal guna mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Misi Kemen PPPA Tahun 2015-2019 adalah Misi Pemerintahan Kabinet Kerja:

1. *Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum*

Pembangunan SDM harus dilaksanakan secara berkualitas untuk mencapai kemajuan yang berkeimbangan antara laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan secara inklusif mulai dari keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kemen PPPA berkoordinasi dengan K/L dan Pemda dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak melalui penyusunan kebijakan/program yang memperhatikan keleluasan akses pendidikan yang tinggi, menguasai ketrampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), yang berdampak positif untuk menciptakan masyarakat beradab dan saling menghargai tanpa diskriminasi khususnya kepada perempuan dan anak.

2. *Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera*

Perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki secara inklusif harus diberi kemudahan untuk memperoleh akses dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kemen PPPA dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sinergi bersama K/L dan Pemda dalam memberikan kontribusi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang pada gilirannya dapat membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas, tercegahnya tindak kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. *Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing*

Bangsa Indonesia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berkualitas akan berdampak pada produksi barang dan jasanya yang berkualitas. Kemen PPPA dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sinergi bersama K/L dan Pemda dalam memberikan kontribusi dalam tersedianya kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang tinggi, sehingga bangsa Indonesia memiliki daya saing tinggi pada tingkat nasional, regional dan global.

4. *Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan*

Peningkatan kualitas hidup manusia yang berdaya saing tidak lepas dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kemen PPPA dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi bersama K/L dan Pemda dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya, Tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Rumusan Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

Dimana Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak
2.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak
3.	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
4.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan sistem data gender dan anak
5.	Persentase hasil pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti
6.	Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemen PP-PA

### Sasaran Strategis Kemen PPPA

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan sasaran dari masing-masing:

- Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatkannya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan:
- a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
  - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- Tujuan 2 : Meningkatkan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatkannya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan:
- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
  - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
  - c. Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.
- Tujuan 3 : Meningkatkan pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak
- Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:
1. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
    - a. Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
    - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
  2. Meningkatnya perlindungan anak, yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
- c. Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang di tindaklanjuti.

Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang ditandai dengan:
  - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
  - b. Terlaksananya promosi kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang didistribusikan dan direspon;
  - c. Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA.
2. Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;
  - a. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  - b. Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;
  - c. Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri;
  - d. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
3. Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak, yang ditandai dengan:
  - a. Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah dan data anak;
  - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah dan data anak.
4. Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan

manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesional dan kompetitif;

5. Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel;
6. Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak, yang ditandai dengan tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kinerja pelaksanaan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

### **Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Urusan pemerintahan konkuren atau urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk kedalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.2**  
**Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota**  
**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional</li> <li>- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional</li> <li>- Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi</li> <li>- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi</li> <li>- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten /kota</li> <li>- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota</li> </ul>
2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional</li> <li>- Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional</li> <li>- Standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten / kota</li> <li>- Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penguatan dan pengembangan</li> </ul>

NO .	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi</li> </ul>	lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota
3.	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional.</li> <li>- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional</li> <li>- Standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota</li> </ul>
4.	Sistem Data Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional</li> <li>- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota</li> </ul>

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten /kota

**Tabel 3.3**  
**Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota**  
**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Pengendalian Penduduk	- Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk - Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.	- Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi	- Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota
2.	Keluarga Berencana (KB)	- Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pengendalian penduduk - Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	- Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	- Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional.</li> <li>- Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga</li> <li>- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam</li> <li>- pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</li> <li>- Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</li> </ul>
3.	Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</li> <li>- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</li> <li>- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</li> <li>- Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</li> </ul>
4.	Standarisasi dan Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga</li> </ul>	-----	-----

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB)		

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2016 – 2021 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusun rencana strategis SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2016 – 2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

#### Visi

**” Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.**

Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan
2. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

### **Tujuan**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DP3APP-KB pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis DP3APP-KB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
- Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
- Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak
- Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data gender dan anak
- Tujuan 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tujuan 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

### **Sasaran**

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

- Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan*  
Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah “*Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender*” yang ditandai dengan:
  - a. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng

- b. Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga
- c. Persentase perempuan di lembaga legislatif
- d. Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga

*Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempun*

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah “Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO” yang ditandai dengan:

- a. Rasio kekerasan terhadap perempuan

“Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO” yang ditandai dengan:

- a. Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar

*Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak*

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

“Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak”

yang ditandai dengan:

- a. Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
- b. Rasio anak korban kekerasan

“Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak”

yang ditandai dengan:

- a. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar

*Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data gender dan anak*

Untuk mencapai tujuan di atas sasaran strategisnya yaitu:

“Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak”

yang ditandai dengan:

- a. Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

*Tujuan 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

“Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran”

yang ditandai dengan:

a. Hasil Penilaian SAKIP

*Tujuan 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera*

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah dengan :

*“Menurunnya angka kelahiran”*

yang ditandai dengan:

- a. Angka kelahiran total per WUS
- b. Rata-rata jumlah anak per Keluarga

*“Meningkatnya akseptor KB”*

yang ditandai dengan:

- a. Presentase pemakaian kontrasepsi

*“Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)”*

yang ditandai dengan:

- a. Presentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need).

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka pada tahun 2021 disusun program dan kegiatan dengan berpedoman pada Nomenkalur Permendagri 90 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,**

##### **Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

##### **Sub Kegiatan :**

- a) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- b) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

##### **Kegiatan : Administrasi Keuangan**

##### **Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- d) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

##### **Kegiatan : Administrasi Umum**

##### **Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan jasa surat menyurat
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- e) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- f) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- g) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- h) Penyediaan alat tulis kantor
- i) Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan
- j) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- k) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- l) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- m) Penyediaan makanan dan minuman

- n) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- o) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- p) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

**Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

**Sub Kegiatan :**

- a) Pendidikan dan Pelatihan Formal

**2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- c) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

**3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

**Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
- b) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- b) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- a) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

**4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

**Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
- b) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

**5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

**Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

**Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

**6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

**Kegiatan :**

**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**

**Sub Kegiatan :**

- a) Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

**Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**

**Sub Kegiatan :**

- a) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
- b) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi

**2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

**Kegiatan : Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**

**Sub Kegiatan :**

- a) Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- b) Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi

**3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**

**Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

**Sub Kegiatan :**

- a) Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- b) Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan rencana kerja tahun 2021 memuat indikator kinerja *outcome/output* masing-masing Program/kegiatan pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam **tabel 4.1** sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

**SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Sesuai Renja/Renstra (Rp)	Pagu Usulan 2021 (Rp)	Ket.
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)										11.527.000.000	9.500.000.000	
	02:02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										8,571,929,000	9.100.000.000	
	2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100			Persentase Unit Kerja yang Terlayani dengan Baik	100	1,355,710,000	1.681.403.188	
	2.02.2.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			6.000.000	4.005.000	
	2.02.2.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			60.000.000	97.350.000	
	2.02.2.02.01.01.05	Penyediaan jasa Jaminan milik daerah			Palangka Raya			Jumlah Unit bangunan gedung yang diasuransi	1			5.000.000	0	
	2.02.2.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			90.000.000	103.406.800	
	2.02.2.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			467.000.000	232.500.800	
	2.02.2.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			150.000.000	29.780.000	
	2.02.2.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			25.000.000	12.000.000	
	2.02.2.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			60.000.000	46.114.500	
	2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			80.000.000	35.000.000	
	2.02.2.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			10.000.000	10.000.000	
	2.02.2.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Palangka Raya			Jumlah paket	1			147.710.000	133.000.000	
	2.02.2.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			20.000.000	21.762.000	
	2.02.2.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			35.000.000	30.000.000	
	2.02.2.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Luar Daerah			Jumlah bulan	12			80.000.000	59.444.259	
	2.02.2.02.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			Dalam Daerah			Jumlah bulan	12			110.000.000	68.696.629	
	2.02.2.02.01.01.35	Rujukan Berobat PNS			Luar Daerah			Jumlah Aparatur	2			10.000.000	0	
	2.02.2.02.01.01.70	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			0	798.343.200	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Sesuai Renja/Renstra (Rp)	Pagu Usulan 2021 (Rp)	Ket.
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.02.2.02.01.02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan		Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)	100			Persentas Pemenuhan Sarana dan Sarana dengan Kondisi Baik pada Unit Kerja Internal	100	147,000,000	5.025.000.000	
	2.02.2.02.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor			Palangka Raya			Jumlah Unit	1			0	5.000.000.000	
	2.02.2.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Palangka Raya			Jumlah Unit	2			0	0	
	2.02.2.02.01.02.10	Pengadaan Meubelair			Palangka Raya			Jumlah paket	1			50.000.000	0	
	2.02.2.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Palangka Raya			Jumlah unit	1			22.000.000	10.000.000	
	2.02.2.02.01.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala halaman dan tempat parkir			Palangka Raya			Jumlah unit	1			25.000.000	10.000.000	
	2.02.2.02.01.02.80	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi			Palangka Raya			Jumlah aplikasi	1			50.000.000	0	
	2.02.2.02.01.02.194	Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura			Palangka Raya			Jumlah Lokasi	1			0	5.000.000	
	2.02.2.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan		Capaian ketersediaan Seragam dan pakaian khusus bagi aparatur (%)	100			Persentase Aparatur yang Disiplin dalam Pelaksanaan Tugas	100	165.000.000	0	
	2.02.2.02.01.03.01	Pengadaan pakaian olahraga			Palangka Raya			Jumlah Stel	75			45.000.000	0	
	2.02.2.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Palangka Raya			Jumlah Stel	75			75.000.000	0	
	2.02.2.02.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Palangka Raya			Jumlah Stel	75			0	0	
	2.02.2.02.01.03.09	Pengadaan pakaian batik tradisional			Palangka Raya			Jumlah Stel	75			45.000.000	0	
	2.02.2.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan		Capaian peningkatan kapasitas pegawai (%)	100			Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	100	27,000,000	68.426.312	
	2.02.2.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Palangka Raya dan luar Kalteng			Jumlah bulan	12			15.000.000	6.350.000	
	2.02.2.02.01.05.36	Rapat koordinasi perencanaan			Palangka Raya			Jumlah rapat	4			12.000.000	62.076.312	
	2.02.2.02.01.05.149	Peningkatan Kapasitas Sistem Perencanaan			Luar Provinsi			Jumlah dokumen	1			0	0	
	2.02.2.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan		Capaian perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja dan keuangan (%)	100			Persentase Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Program/Kegiatan dan Anggaran Terlaksana dengan Baik	100	95.000.000	180.570.500	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Sesuai Renja/Renstra (Rp)	Pagu Usulan 2021 (Rp)	Ket.
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.02.2.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Palangka Raya			Jumlah dokumen	1			15.000.000	6.904.000	
	2.02.2.02.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			0	45.000.000	
	2.02.2.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Palangka Raya			Jumlah dokumen	1			15.000.000	8.500.000	
	2.02.2.02.01.06.06	Penyusunan rka-SKPD			Palangka Raya			Jumlah dokumen	2			25.000.000	18.300.000	
	2.02.2.02.01.06.11	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan			Palangka Raya			Jumlah dokumen	1			0	0	
	2.02.2.02.01.06.15	Penyusunan renja SKPD			Palangka Raya			Jumlah dokumen	2			25.000.000	16.466.500	
	2.02.2.02.01.06.35	Penyusunan Renstra SKPD			Palangka Raya			Jumlah dokumen	1			0	10.400.000	
	2.02.2.02.01.06.78	Penyusunan dokumen ARG DP3APPKB			Palangka Raya			Jumlah dokumen	1			15.000.000	0	
	2.02.2.02.01.06.63	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah			Palangka Raya			Jumlah dokumen	1			0	75.000.000	
	<b>2.02.2.02.01.08</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>	<b>Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah</b>	<b>Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan</b>		<b>Capaian pengelolaan aset dan barang milik daerah (%)</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Pengelolaan Aset dan BMD</b>	<b>100</b>	<b>22.650.000</b>	<b>17.600.000</b>	
	2.02.2.02.01.08.01	Pengelolaan inventaris barang daerah			Palangka Raya			Jumlah dokumen	1			22.650.000	17.600.000	
	<b>2.02.2.02.01.15</b>	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah</b>	<b>Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan</b>		<b>Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA (%)</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan PP-PA</b>	<b>100</b>	<b>2,793,000,000</b>	<b>805.000.000</b>	
	2.02.2.02.01.15.05	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Kegiatan	2			200.000.000	27.000.000	
	2.02-2.2.0101-15.9	Sosialisasi Advokasi PUG di Kab./Kota			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			210.000.000	0	
	2.02.2.02.01.15.10	Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tingkat Provinsi			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			150.000.000	50.000.000	
	2.02-2.2.0101-15.15	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			0	110.000.000	
	2.02-2.2.0101-15.17	Rapat-Rapat Koordinasi Pemantapan Lembaga			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			75.000.000	0	
	2.02.2.02.01.15.20	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA TingkatProvinsi			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			75.000.000	0	
	2.02.2.02.01.15.24	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi			Palangka Raya			Jumlah Dokumen	1			200.000.000	0	
	2.02.2.02.01.15.25	Rakornas Forum Anak Nasional			luar Kalteng			Jumlah Dokumen	1			150.000.000	240.000.000	
	2.02.2.02.01.15.26	Rakorda Forum Anak Daerah			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			75.000.000	0	
	2.02.2.02.01.15.27	Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			75.000.000	0	
	2.02.2.02.01.15.29	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			285.000.000	63.000.000	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Sesuai Renja/Renstra (Rp)	Pagu Usulan 2021 (Rp)	Ket.
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.02.2.02.01.15.30	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			170.000.000	0	
	2.02.2.02.01.15.31	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			275.000.000	40.000.000	
	2.02.2.02.01.15.32	Sosialisasi kebijakan Daerah Tentang Pemenuhan Hak Anak (PHA)			Palangka Raya			Jumlah peserta	60			75.000.000	0,00	
	2.02.2.02.01.15.35	Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak			Palangka Raya			Jumlah peserta	50			75.000.000	0	
	2.02.2.02.01.15.38	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak			Palangka Raya			Jumlah Dokumen	1			350.000.000	0	
	2.02.2.02.01.15.39	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Tentang PHA			Palangka Raya			Jumlah Dokumen	1			35.000.000	0	
	2.02.2.02.01.15.40	Monev PUG di Daerah			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			50.000.000	75.000.000	
	2.02.2.02.01.15.41	Monev Perlindungan Perempuan dan Anak Di daerah			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			84.000.000	0	
	2.02.2.02.01.15.42	Monev Pemenuhan Hak Anak (PHA) Didaerah			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			84.000.000	0	
	2.02.2.02.01.15.43	Penyuluhan tentang Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak			Palangka Raya			Jumlah Dokumen	1			100.000.000	0	
	2.02.2.02.01.15.44	Rapat Forum Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)			Palangka Raya			Jumlah Dokumen	1			0	50.000.000	
	2.02.2.02.01.15.45	Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) PPA Provinsi Kalimantan Tengah			Palangka Raya			Jumlah Bulan	12			0	150.000.000	
	2.02.2.02.01.15.46	Rapat Koordinasi Tim Lembaga Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah			Palangka Raya			Jumlah Dokumen	1			0	0	
	<b>2.02.2.02.01.16</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah</b>	<b>Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan</b>		<b>Cakupan pengembangan layanan lembaga PUG, PP PA (%)</b>	<b>100</b>			<b>Meningkatnya Persentase Pelembagaan PUG</b>	<b>100</b>	<b>45.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	
	2.02.2.02.01.16.33	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)			Palangka Raya			Jumlah Dokumen	1			0	90.000.000	
	2.02.2.02.01.16.42	Pemantapan Jejaring Kelembagaan			Palangka Raya			Jumlah Dokumen	1			0	60.000.000	
	2.02-2.2.0101-16.51	Pelatihan ARG Bagi Focal Point			Palangka Raya			Jumlah Peserta	46			45.000.000	0	
	<b>2.02.2.02.01.17</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>					<b>100</b>	<b>Cakupan layanan perlindungan perempuan dan anak (%)</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>2,082,569,000</b>	<b>415.000.000</b>	
	2.02.2.02.01.17.08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen	1			0	100.000.000	
	2.02.2.02.01.17.13	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen	1			0	65.000.000	
	2.02.2.02.01.17.26	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng			Palangka Raya			Jumlah Kegiatan	5			230.500.000	0	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Sesuai Renja/Renstra (Rp)	Pagu Usulan 2021 (Rp)	Ket.
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.02.2.02.01.17.27	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan			Palangka Raya			Jumlah dokumen	1			50.000.000	0,00	
	2.02.2.02.01.17.28	Pemilihan Putra dan Putri Duta GenderProvinsi Kalteng			Palangka Raya			Jumlah Kegiatan	1			40.000.000	0	
	2.02.2.02.01.17.32	Peningkatan Sistem Pelayanan Rujukan Lanjutan			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen	1			0	100.000.000	
	2.02.2.02.01.17.33	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)			Palangka Raya			Jumlah Dokumen	1			482.000.000	0	
	2.02.2.02.01.17.36	Penyediaan Jasa Operasional Satgas PkdRT (Penyuluhan,dll)			Palangka Raya			Jumlah bulan	12			27.000.000	0	
	2.02-2.2.0101 -17.37	Pelatihan Kader Satgas PKdRT Prov/Kab/Kota Untuk Penanganan Tahap Awal			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Kader	100			100.000.000	0	
	2.02.2.02.01.17.40	Layanan Kesehatan Khusus Perempuan			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah peserta	300			300.000.000	0	
	2.02.2.02.01.17.42	Promosi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah kegiatan	4			50.000.000	100.000.000	
	2.02.2.02.01.17.43	Pembinaan terhadap Posyandu melalui Penguatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah kegiatan	100			60.000.000	50.000.000	
	2.02.2.02.01.17. xx	Fasilitasi dan Sosialisasi Pembentukan Satgas PKdRT			Palangka Raya			Jumlah peserta	140			502.000.000	0	
	2.02.2.02.01.17. xx	Sosialisasi dan Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Serviks Dalam Rangka Hari Nasional Perempuan			Palangka Raya			Jumlah peserta	50			221.569.000	0	
	<b>2.02.2.02.01.18</b>	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	<b>Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah</b>	<b>Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan</b>		<b>Cakupan peran serta perempuan di berbagai bidang (%)</b>	<b>100</b>			<b>Meningkatnya Partisipasi dan Promosi Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>100</b>	<b>899,000,000</b>	<b>247.500.000</b>	
	2.02.2.02.01.18.07	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah kegiatan	2			137.000.000	60.500.000	
	2.02.2.02.01.18.08	Pembentukan Kaukus Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah kaukus	1			60.000.000	0	
	2.02.2.02.01.18.11	Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga Untuk Menuju Keluarga Yang Berkualitas			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah peserta	100			250.000.000	0	
	2.02.2.02.01.18.13	Pengembangan Forum Pemberdayaan Produktifitas Ekonomi Perempuan (F-PPEP)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			60.000.000	0	
	2.02.2.02.01.18.14	Sosialisasi Tentang Akses Permodalan Untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah peserta	40			60.000.000	0	
	2.02.2.02.01.18.15	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen movev	1			32.000.000	0	
	2.02.2.02.01.18.17	Penilaian Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			140.000.000	0	
	2.02.2.02.01.18.19	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan PM2L			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah kelompok	10			0	0	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Sesuai Renja/Renstra (Rp)	Pagu Usulan 2021 (Rp)	Ket.
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.02.2.02.01.18.25	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen	1			100.000.000	110.000.000	
	2.02.2.02.01.18.26	Capacity Building Bagi Perempuan			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah peserta	40			60.000.000	50.000.000	
	2.02.2.02.01.18.27	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah peserta	30			0	27.000.000	
	<b>2.02.2.02.01.20</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</b>	<b>Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah</b>	<b>Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan</b>		<b>Cakupan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak (%)</b>	<b>100</b>			<b>Meningkatnya Upaya Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>100</b>	<b>400.000.000</b>	<b>260.000.000</b>	
	2.02.2.02.01.20.08	Kegiatan Sunatan massal			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah peserta	60			140.000.000	0	
	2.02.2.02.01.20.18	Pelatihan Penyuluhan Sebaya Tentang Pergaulan Bebas			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah peserta	100			200.000.000	0	
	2.02.2.02.01.1.20.21	Pelatihan Alat Analisis Perencanaan Pembangunan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) Bagi Anggota Gugus Tugas PHA Provinsi			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah peserta	15			60.000.000	0	
	2.02.2.02.01.20.23	Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen	1			0	82.000.000	
	2.02.2.02.01.20.24	Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen	1			0	178.000.000	
	2.02.2.02.01.20.26	Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen	1			0	0	
	<b>2.02.2.02.01.21</b>	<b>Program Penyusunan Profil Lembaga</b>	<b>Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah</b>	<b>Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan</b>		<b>Capaian ketersediaan data profil PUG PP PA (%)</b>	<b>100</b>			<b>Meningkatnya Sistem Data Gender dan Anak</b>	<b>100</b>	<b>540.000.000</b>	<b>249.500.000</b>	
	2.02.2.02.01.21.07	Surveilans Data Terpilah Gender dan Anak Bagi Anggota Forum Data di Provinsi			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			45.000.000	0	
	2.02.2.02.01.21.09	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak			Palangka Raya			Jumlah aplikasi	1			0	64.500.000	
	2.02.2.02.01.21.10	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak			Palangka Raya			Jumlah Dokumen	1			170.000.000	30.000.000	
	2.02.2.02.01.21.12	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik			Palangka Raya			Jumlah Bulan	12			175.000.000	40.000.000	
	2.02.2.02.01.21.13	Sosialisasi Hasil Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak			Palangka Raya			Jumlah peserta	26			60.000.000	0	
	2.02.2.02.01.21.17	Surveilans Data Pemenuhan Hak Anak			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			45.000.000	0	
	2.02.2.02.01.21.18	Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak			Palangka Raya			Jumlah Dokumen	1			45.000.000	0	
	2.02.2.02.01.21.21	Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Forum Puspa Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			0	75.000.000,00	
	2.02.2.02.01.21.22	Pengembangan Layanan Keterbukaan Informasi Publik			Palangka Raya			Jumlah Dokumen	1			0	40.000.000	
	2.02.2.02.01.21.xx	Sosialisasi Advokasi Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak ( Forum PUSPA)			Palangka Raya			Jumlah Dokumen	1			0	0	
	<b>02:08</b>											<b>2,955,071,000</b>	<b>400.000.000</b>	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Sesuai Renja/Renstra (Rp)	Pagu Usulan 2021 (Rp)	Ket.
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera												
	2.08.2.02.01 - 15	Program Keluarga Berencana	Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan		Cakupan layanan kependudukan dan Pembinaan Keluarga (%)	100			Meningkatnya Pelaksanaan Program/Kegiatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	100	2,565,071,000	400.000.000	
	2.08.2.02.01.15.02	Pelayanan KIE			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			37.300.000	75.000.000	
	2.08.2.02.01.15.22	Promosi Keikutsertaan BerKB Pada Pasangan Usia Subur (PUS)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Peserta	100			75.000.000	0	
	2.08.2.02.01.15.24	Promosi Kepedulian KB			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah promosi	1			75.000.000	0	
	2.08.2.02.01.15.25	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah promosi	1			75.000.000	75.000.000	
	2.08.2.02.01.15.26	Bimbingan Teknis Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Peserta	60			120.000.000	0	
	2.08.2.02.01.15.27	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kalimantan Tengah			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			45.000.000	0	
	2.08.2.02.01.15.28	Sosialisasi/Advokasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Tingkat Kab./Kota			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			75.000.000	0	
	2.08.2.02.01.15.29	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk			Provinsi Kalimantan Tengah, luarkalteng			Jumlah Dokumen	1			35.000.000	35.000.000	
	2.08.2.02.01.15.31	Bimbingan Teknis Sinkronisasi Kebijakan Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Peserta	30			75.000.000	0	
	2.08.2.02.01.15.33	Peningkatan Jejaring Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Peserta	30			75.000.000	0	
	2.08.2.02.01.15.34	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			75.000.000	40.000.000	
	2.08.2.02.01.15.35	Money Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Dokumen	1			75.000.000	50.000.000	
	2.08.2.02.01.15.36	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah peserta	30			75.000.000	0	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Sesuai Renja/Renstra (Rp)	Pagu Usulan 2021 (Rp)	Ket.
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.08.2.02.01.15.37	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah peserta	30			82.771.000	0	
	2.08.2.02.01.15.50	Pembinaan Ketahanan Keluarga pada Kegiatan Momentum Keluarga Berencana			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen	1			25.000.000	75.000.000	
	2.08.2.02.01.15.53	Peningkatan Kapasitas Bina Ketahanan Remaja dalam Kesehatan Reproduksi Remaja			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen	1			0	50.000.000	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Penyusunan Kebijakan daerah tentang pembinaan ketahanan keluarga			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen	1			35.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan keluarga sejahtera Tk.Prov			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah unit	1			50.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pembinaan dan bimbingan penguatan kelompok kegiatan Tk. Prov			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah orang	50			40.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Promosi tentang pengasuhan dan Tumbuh kembang anak Tk. Prov.			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah orang	50			40.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Promosi dan Sosialisasi menjadi orang tua hebat dalam pengasuhan anak Tk.Prov. (orang)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah orang	40			35.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pembinaan remaja tentang generasi berencana Tk. Prov.(orang)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah orang	40			30.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pembinaan peningkatan akses PIK Remaja Tk. Prov.			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Lembaga	40			30.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pembinaan lembaga pelayanan keluarga sejahtera Tk.Prov			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Lembaga	30			25.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pemberian bantuan pengembangan UPPKS			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Unit	30			90.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Promosi dan kampanye tentang delapan fungsi keluarga di kampung KB			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah orang	40			35.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pertemuan Koordinasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan keluarga			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah orang	30			40.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam pemberdayaan keluarga			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah orang	30			25.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan keluarga			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah unit	50			150.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Penyusunan kebijakan dukungan program Kependudukan, KB dan Pembinaan Keluarga (Dokumen)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen	1			25.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Penyusunan materi Advokasi tentang KKBPk dengan muatan kearifan lokal (Jumlah Modul Materi)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Modul Materi	1			40.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Penyusunan materi KIE tentang KKBPk dengan muatan kearifan lokal (Jumlah Modul materi)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Modul Materi	1			40.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Penyediaan materi Advokasi dan KIE ke daerah Kab/Kota (Jumlah Buku)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah buku	1			150.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Penyediaan sarana dan prasarana Advokasi dan KIE (Unit)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah Unit	1			100.000.000	0	

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Sesuai Renja/Renstra (Rp)	Pagu Usulan 2021 (Rp)	Ket.
						Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Promosi Program KKBPK melalui media massa dan elektronika ( Kegiatan)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah kegiatan	1			40.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Advokasi dan KIE Program KKBPK kepada Mitra Kerja (orang)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah orang	1			25.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Advokasi dan KIE melalui kegiatan momentum (orang)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah orang	40			50.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Penyusunan kebijakan daerah tentang peran ormas dalam program KB (dokumen)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen	1			25.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Kerjasama kemitraan pemangku kepentingan dalam program KB (dokumen)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah dokumen	1			25.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Advokasi dan KIE di Kampung KB ( Desa/lokasi)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah desa/lokasi	1			350.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . Xx.xx	Pertemuan koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam pembinaan kampung KB (orang)			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah orang	40			50.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . 21	<b>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>	<b>Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah</b>	<b>Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan</b>		<b>Cakupan layanan terhadap kasus anak/remaja pengguna NAPZA (%)</b>	<b>100</b>			<b>Meningkatnya Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV/AIDS</b>	<b>100</b>	<b>310.000.000</b>	<b>0</b>	
	2.08 . 2.02.1 . 21 . 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah			Provinsi Kalimantan Tengah			Jumlah peserta	400		400	310.000.000	0	
	2.08 . 2.02.1 . 25	<b>Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</b>	<b>Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah</b>	<b>Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan</b>		<b>Cakupan penguatan Kelembagaan Kb di masyarakat(%)</b>	<b>100</b>			<b>Meningkatnya Pelaksanaan Upaya Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</b>	<b>100</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	
	2.08 . 2.02.1 . 25 . 06	Peningkatan Kualitas SDM			Kota Palangka Raya			Jumlah Peserta	100		100	80.000.000	0	
												<b>11.527.000.000</b>	<b>9.500.000.000</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*Trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar benar dikedepankan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam rangka perwujudan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang.

DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi Keluaran berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUHA) di semua Perangkat daerah (PD) dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat. Agar setiap PD dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PUHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas awal yang paling mendasar dari DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengubah mindset individu dan budaya lembaga dari buta dan bias gender menjadi sadar, sensitif, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli anak. Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari capaian layanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan usaha dan komitmen dari seluruh stakeholder, mengingat jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Selain itu, melihat visi dan misinya, maka keberhasilan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan Organisasi

Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatannya.

Palangka Raya, 07 Agustus 2020

KEPALA DINAS P3APPKB  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

**dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630527 199102 1 001